



Efektivitas Program Kartu Prakerja Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Penerima Pada Kecamatan Sampung Ponorogo Ditinjau Perspektif Ekonomi Islam

Anik Nur Ria¹, Candra Febrilyantri²

¹ Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Indonesia, aniknurria22@gmail.com

² Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Indonesia, candrafebrilyantri@gmail.com

Article Info

Article history:

Received June 24, 2023

Revised December 29, 2023

Accepted December 30, 2023

Available online December 31, 2023

*Corresponding author email:
aniknurria22@gmail.com

Keywords:

Effectiveness, Pre-Employment Program, Welfare

Abstract

Introduction: Effectiveness is a measure that shows the extent to which an objective in terms of quantity, quality and time has been achieved in management, as well as what goals have been achieved to create creativity. The existence of a pre-employment card program for job seekers, people who have lost their jobs, as well as for people who want to improve their skills to meet their daily needs is very important to improve people's welfare. The main objective of this study was to analyze the implementation of the pre-employment card program in Sampung District, and to analyze the strategy of the pre-employment card program in the selection process in Sampung District, to analyze the effectiveness of the pre-employment card program in improving people's welfare in Sampung District. **Research Methods:** This research method uses a qualitative approach and this type of research uses a type of field research. Collecting data using interviews, observation, and documentation. Techniques in data analysis using data collection, data reduction, data presentation, and drawing conclusions. **Results:** Based on the results of field research, the authors concluded: 1) The enthusiasm for the implementation of the pre-employment card program in Sampung District was very high, both for the local government and its residents. 2) The strategy adopted is to present an IT team in each village and disseminate this information on social media. 3) The welfare of the community itself has not

been fully fulfilled, but from the incentives obtained for additional business capital for daily needs, so that related to the welfare of the Islamic perspective has been fulfilled due to an increase in the economic level, and related to skills welfare is also fulfilled where there is training.

DOI: [10.21154/nigosiya.v3i2.2167](https://doi.org/10.21154/nigosiya.v3i2.2167)
Page: 419-430

Nigosiya with CC BY license. Copyright © 2023
Anik Nur Ria, Candra Febrilyantri

PENDAHULUAN

Salah satu permasalahan pada ekonomi dengan skala makro adalah adanya pengangguran. Tingkat pengangguran yang semakin tinggi bisa menjadi indikator adanya tekanan psikologi yang tinggi dan penurunan pada standar hidup (Faizin, 2021). Menurut pendapat dari Sukirno, pengangguran didefinisikan pada mereka yang pada usia aktif kerja tetapi sedang atau tidak bekerja karena pertimbangan jenis pekerjaan yang sesuai dan jumlah gaji yang diinginkan (Leasiwal, 2022).

Pengangguran terjadi karena adanya berbagai faktor diantaranya adalah sempitnya lapangan pekerjaan, kemudian banyaknya persyaratan yang tidak mampu dipenuhi oleh para pelamar kerja. Selain itu penyebab pengangguran dalam dua tahun terakhir yang dilansir dari laman resmi Badan Pusat Statistik pada Agustus 2022 terdapat 4.150.000 atau sebesar 1,98 persen Indonesia pada usia produktif terkena positif virus covid-19. Terdiri dari pengangguran karena COVID-19 berjumlah 24.000 (dua puluh empat ribu) penduduk, Bukan Angkatan Kerja (BAK) karena COVID-19 32.000 (tiga puluh dua ribu) penduduk, sementara yang tidak bekerja dan terkena Covid 19 sebanyak (sebelas ribu) sedangkan pada masyarakat yang dan menjadi menganggur karena COVID- 19 348.000 (tiga ribu empat ratus delapan ribu) penduduk (Badan Pusat Statistik, 2022).

Pandemi mendorong pemerintah melakukan kebijakan terkait dengan situasi yang ada dengan adanya UU Cipta Kerja 2022 Nomor 11. Adanya UU Cipta kerja dimaksudkan pemerintah menanggapi fluktuasi ekonomi akibat adanya pandemic covid 19 dengan cara mempermudah adanya proses melakukan investasi dalam negeri. Adanya kemudahan dalam investasi dimaksudkan dalam mendorong terciptanya lapangan kerja secara luas. Hal ini dilakukan dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hidup yang layak bagi masyarakat. Adanya Undang-Undang terkait cipta lapangan kerja, terdapat gagasan dari perintah berupa penyederhanaan dan penyelarasan regulasi dan perizinan, serta pencapaian investasi yang berkualitas. Selain itu, ditegaskan lagi dalam Peraturan Presiden perubahan kedua No. 36 tahun 2020 Tentang Pengembangan Kompetensi Kinerja Melalui Program Kartu Prakerja. Program ini dikhususkan kepada pencari kerja, pekerja atau buruh yang terkena PHK dan pekerja atau buruh yang membutuhkan peningkatan kompetensi melalui pelatihan guna untuk memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap, dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu. Berdasarkan data yang diperoleh dari tim fasilitator prakerja, bahwa di tingkat Jawa Timur Kabupaten Ponorogo di posisi ke 14 (empat belas) serta penerima manfaat program kartu prakerja di

Kabupaten Ponorogo mulai Maret 2020 sampai tahun 2022 yang dimulai dari gelombang 1 sampai dengan gelombang 47 secara keseluruhan berjumlah 44.000 (empat puluh empat ribu) penerima manfaat kartu prakerja yang berasal dari 21 kecamatan di Kabupaten Ponorogo, berikut data jumlah penerima manfaat kartu prakerja di Kabupaten Ponorogo (D. N. Yanuari, komunikasi pribadi, 30 Januari 2023).

Ditinjau dari perspektif Ekonomi Islam telah disebutkan bahwasanya Ekonomi Islam mengarahkan pada tercapainya kebaikan, kesejahteraan, kepada seluruh ciptaanNya. Kesejahteraan merupakan cita-cita manusia, bangsa, dan Negara. Allah SWT menganjurkan umatnya untuk bekerja dalam memenuhi kebutuhan keluarganya sehingga dapat mencapai kesejahteraan. Dari pernyataan diatas, maka saya tertarik mengadakan penelitian pada program kartu prakerja. Untuk itu penulis mengangkat judul **“Efektivitas Program Kartu Prakerja Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Penerima Di Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo Ditinjau Dengan Perspektif Ekonomi Islam”**.

METODE PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan dengan metode kualitatif dan pendekatan deskriptif dengan jenis fenomenologi. Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo dan peneliti berperan sebagai instrumen penentu dalam memperoleh data kualitatif. Instrumen utama dalam penelitian kualitatif adalah peneliti sendiri. Pelaksanaan penelitian ini akan dilaksanakan mulai 10 – 15 April 2023 di Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo.

Penelitian ini menggunakan sumber primer yakni dari masyarakat yang mendapatkan manfaat dari kartu prakerja dan pihak yang terkait dengan pelaksanaan program Kabupaten Ponorogo dan data sekunder data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh peneliti dari berbagai bahan Pustaka yang ada baik itu jurnal, buku, media cetak, catatan, skripsi, ataupun lain sebagainya. Teknik pengumpulan data penelitian adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi, display dan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Data Implementasi Program Kartu Prakerja di Kecamatan Sampung

Keterlaksanaannya program kartu prakerja di Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo tidak luput dengan adanya proses komunikasi yang baik antara pihak-pihak yang terkait baik itu jajaran dari pihak Kecamatan, jajaran kepala desa, warga dan tim terkait. Komunikasi yang dilakukan oleh pihak kecamatan dalam pelaksanaan program kartu prakerja yakni dengan melakukan agenda pertemuan yang dihadiri oleh pihak yang terkait (Kades Sampung, komunikasi pribadi, 2 April 2023).

Selain mengadakan sosialisasi pemerintahan Kecamatan Sampung juga memberikan kesempatan komunikasi melalui media sosial baik itu berupa *website* dan halaman *facebook* serta *twitter*. Berikut hasil wawancara dengan staf kecamatan yang dilakukan oleh peneliti.

“Iya tentu mbak, selain adanya sosialisasi laman pertanyaan dan penyebaran informasi juga kita lakukan di beberapa media misalnya *website* kecamatan Sampung, terus tanya jawab di *twitter* sama di *facebook* mbak, jadi para kepala desa tidak harus ke kantor kecamatan untuk memperoleh informasi” (Hadi, komunikasi pribadi, 2 April 2023).

Penuturan tersebut didukung dengan hasil temuan observasi peneliti pada situs website dari kecamatan Sampung yang membuat acara sosialisasi dan adanya beberapa kolom komentar terkait dengan program kecamatan. Berikut hasil temuan peneliti.



Gambar 1. Sosialisasi Program Kartu Prakerja

Selain adanya komunikasi yang baik dalam implementasi program diperlukannya sumber daya yang cukup. Berikut hasil wawancara dengan pihak staf kecamatan Sampung.

“Berkaitan sumber daya ini termasuk dengan sarana prasarana mbak, kemudian tim IT dan juga untuk melakukan sosialisasi dan pelatihan serta sebagainya jadi ini nanti juga tergantung kuota juga mbak” (Tim IT Kecamatan Sampung, komunikasi pribadi, 2 April 2023).

Data Strategi Program Kartu Prakerja Dalam Proses Seleksi Di Kecamatan Sampung

Penerapan kebijakan yang berhubungan dengan kesejahteraan masyarakat baik itu kesejahteraan terkait dengan ekonomi maupun *skill* berbentuk pelatihan harus mengendapkan kesesuaian penyaluran pada yang benar-benar berhak mendapatkannya atau bisa dikatakan setiap kebijakan harus dilakukan dengan tepat sasaran. Strategi dalam pelaksanaan penyaluran kartu prakerja sehingga sampai pada yang benar-benar membutuhkan dilakukan dengan beberapa cara oleh pemerintahan terkait dengan kebijakan kartu prakerja di kecamatan Sampung Ponorogo salah satunya adalah dengan melakukan pengumuman di berbagai platform media sosial dan selebaran pada setiap desa di kecamatan Sampung terkait dengan syarat dan ketentuan dalam mengikuti kartu prakerja. Berikut hasil observasi yang ditemukan peneliti.



Gambar 2 Pengumuman syarat prakerja di website

Selain melakukan pengumuman di berbagai website salah satunya seperti pada gambar di atas, pelaksanaan pengumuman terkait dengan syarat dan ketentuan kartu prakerja dan pelaksanaan seleksi juga menggunakan edaran yang diberikan oleh kepala desa di kecamatan Sampung Ponorogo. Berikut penuturan dari salah satu kepala desa di kecamatan Sampung.

“Pada saat sosialisasi di kantor kecamatan setiap kepala desa diberikan surat edaran terkait dengan program prakerja mulai dengan waktu pelaksanaan dan syarat ketentuan yang ingin mengikuti untuk diteruskan kepada setiap RT yang kemudian disampaikan ke masyarakat”

Perlunya strategi dalam melaksanakan seleksi penerima kartu prakerja di kecamatan Sampung sendiri dikarenakan banyaknya peminat yang ingin mendaftarkan diri dan memperoleh prakerja, sehingga pelaksanaannya harus dilakukan seleksi karena jumlah kuota juga terbatas. Berikut hasil wawancara dengan staf kecamatan sampung terkait dengan syarat untuk seleksi penerima kartu prakerja.

“Kalau terkait dengan syarat dan ketentuan ini digunakan sebagai seleksi tahapan awal mbak dan kami juga mengacu pada peraturan yang diberikan oleh pemerintah pusat yakni harus WNI, kemudian ada Batasan usia, tidak sedang bekerja, dalam satu KK hanya dua saja yang dapat memperoleh kartu prakerja, kemudian juga tidak ASN, TNI/Polri”

Strategi tersebut mampu memberikan proses seleksi secara ketat dan banyak yang gugur terutama pada aspek sedang tidak bekerja karena memang beberapa orang yang telah bekerja di instansi tertentu misalnya instansi pendidikan swasta masih ikut untuk mendaftarkan diri sebagai penerima kartu prakerja. Berikut penuturan dari salah satu pendaftar yang dinyatakan gagal.

“Ya mbak saya tidak lolos prakerja karena memang NIK saya sudah terdaftar sebagai pengajar di salah satu sekolah swasta, mungkin hal itu ya mbakyang menjadikan tidak lolos, sebenarnya saya sedih mbak karena tidak lolos prakerja” ([Sumi, komunikasi pribadi, 3 April 2023](#)).

Data Efektivitas Program Kartu Prakerja Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Kecamatan Sampung

Data hasil penelitian menunjukkan keragaman latar belakang pekerjaan dari penerima manfaat kartu prakerja yakni mulai dari petani, pedagang, dan supir dan usaha kecil lainnya. Hasil kuesioner juga menunjukkan motif masyarakat dalam mengikuti kartu prakerja yakni untuk mendapatkan intensif, hasil tersebut dibuktikan dari sebanyak 8 responden atau 100% menjawab tujuan mengetahui program pelatihan prakerja adalah untuk mendapatkan intensif. Hasil kuesioner tersebut selaras dengan pengungkapan pada wawancara yang dilakukan peneliti yakni terkait dengan peningkatan pendapat penerima kartu prakerja memang meningkat per bulannya. Berikut beberapa pertanyaan terkait dengan peningkatan pendapatan selama mengikuti program prakerja. Berikut penuturan dari bapak Eko ([Eko, komunikasi pribadi, 4 April 2023](#)).

“Pengeluaran keluarga baik sebelum dan sesudah mendapat prakerja yakurang lebih berkisar Rp 1.400.000 mbak per bulannya, untuk pemasukan ya alhamdulillah setelah

menerima prakerja ini meningkat paling tidak satu bulan yang sebelumnya Rp 1.500.000 menjadi Rp 1.800.000”.

Hasil dari wawancara lain juga menunjukkan memang pada awalnya penerima program prakerja memiliki penghasilan dibawah 1,5 juta per bulanya, dengan adanya penerima manfaat prakerja penghasilan per bulan meningkat menjadi sebesar 1,7 juta sampai dengan 2 juta per bulanya. Berikut penuturan dari bapak Hendri ([Hendri, komunikasi pribadi, 4 April 2023](#)).

“Untuk pemasukan ya alhamdulillah setelah menerima prakerja ini meningkat paling tidak satu bulan yang sebelumnya Rp 1.500.000 menjadi Rp 1.700.000.”

Hal ini sesuai dengan hasil kuesioner dimana Indikator efektifitas yang lain dalam program pemanfaat kartu prakerja adalah ketepatan sasaran bagi yang berhak menerima yakni data menunjukkan bahwa rata-rata atau bahkan sebagian besar penerima manfaat kartu prakerja merupakan masyarakat dengan pendapatan dibawah dua juta pada setiap bulanya yakni pada kuesioner sebesar 87,5% menyatakan tidak setuju pada pendapat mencapai dua juta, pada indikator lain adalah kepastian pendapatan, data menunjukkan bahwa sebesar 87,5% atau 7 dari 8 responden menyatakan ketidakpastian dalam pendapatannya. Selanjutnya adalah indikator pemenuhan kebutuhan dengan pendapatan yang ada yakni apakah dengan pendapatan tersebut mampu memenuhi kebutuhan, sebanyak 8 responden atau 100% menyatakan bahwa pendapatan saat ini tidak mampu mencukupi kebutuhan.

Penerimaan manfaat terkait dengan kesejahteraan tidak hanya pada aspek ekonomi yakni penghasilan akan tetapi juga pada aspek ekonomi yang lain seperti dengan adanya peningkatan pada pendapatan penerima program prakerja dapat melakukan perbaikan terhadap papan yakni pada rumahnya. Berikut penuturan dari ibu Umi ([Umi, komunikasi pribadi, 4 April 2023](#)).

“Alhamdulillah soal rumah memang rumah saya sendiri dan saya rasa layak untuk saya, dengan adanya manfaat prakerja saya dapat sedikit memperbaiki pada bagian kamar mandi ya walau gak mewah sertidaknya lebih baik dari sebelumnya dan menambah perlengkapan yang ada”.

Implementasi Program Kartu Prakerja di Kecamatan Sampung

Implementasi kartu prakerja sendiri adalah satu bentuk dari kebijakan atau program yang dibuat oleh pemerintah, berkaitan dengan hal tersebut dalam ranah penerapan kebijakan mengutip dari pendapat yang dikemukakan oleh Edward III yang dikutip oleh Subarsono, agustino, Winarno, dan Wahab mengungkapkan bahwa terdapat 4 faktor yang mempengaruhi sebuah kebijakan public yakni adanya (1) Komunikasi; (2) Sumber Daya; (3) Disposisi; dan (4) Struktur Birokrasi. Komponen tersebut harus diperhatikan dengan baik sebagai sebuah bentuk sistem yang memberikan pengaruh terhadap keberhasilan dalam mencapai sebuah tujuan pada penerapan kebijakan ([Agustino, 2008](#)).

Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa adanya proses komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah kecamatan Sampung Ponorogo terkait dengan adanya penerima

manfaat kartu prakerja, hal ini dilakukan dengan mengundang kepala desa dan melakukan sosialisasi. Jenis komunikasi dengan melakukan sosialisasi baik secara langsung dengan pertemuan ataupun melalui social media selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Ningrum, Wijayanto, dan Taufiq yakni terkait dengan pelaksanaan prakerja di Ponorogo khususnya kecamatan Sampung tahap komunikasi dilakukan dengan menggunakan media social Instagram (Ningrum dkk., 2022).

Menurut Budiani memberikan pendapat terkait dengan pengukuran efektivitas sebuah program adanya beberapa indikator pengukuran yakni dengan salah satunya adalah adanya pelaksanaan sosialisasi program itu sendiri (Budiani, 2007). Sosialisasi program ini terkait dengan kemampuan dari penyelenggara dalam memberikan informasi yang berhubungan dengan pelaksanaan program sehingga masyarakat mengetahui terkait dengan jenis kegiatan, hal yang akan dilakukan dan sasaran yang ingin dicapai dengan adanya program tersebut. Dalam hal sosialisasi program kartu prakerja oleh Tim Pelaksana dan Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja dirasakan sudah baik akan tetapi memang terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh masyarakat adalah pada tahap pendaftaran tidak banyak masyarakat yang telah memahami bagaimana pelaksanaan atau Langkah-langkah dalam proses pendaftaran dan proses seleksi serta model pelatihan yang akan didapatkan nantinya. Hal tersebut selaras dengan hasil penelitian yang diungkapkan oleh para informan dimana mereka berusaha mencari informasi sendiri melalui berbagai cara baik itu forum diskusi group atau melalui berbagai media sosial dan website resmi terkait dengan informasi dari tahap pendaftaran, kemudian seleksi, kemudian macam dan jenis pelatihan yang ada, sampai pada proses sertifikat dan pencairan dana insentif yang akan didapatkan.

Keberhasilan implementasi kebijakan juga bisa dilihat dari sumber dayapelaksananya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya sinergi baik antara pemerintahan pusat dengan pemerintahan kecamatan. Selain sumber daya pelaksanan kaitannya sumber daya ini adalah pada masalah anggaran dana yang diberikan. Mengutip dari pernyataan Menteri perekonomian yakni bapak Airlangga Hartarto sebesar 99,12% adalah angka persentase anggaran yang berhasil direalisasikan pada kartu prakerja tahun 2022 dengan serapan dana sebesar Rp 17,84 triliun. Berdasarkan data pencatatan dari kemenko sebanyak 4.984.790 orang telah mendapatkan manfaat dari adanya kartu prakerja (Sophia, 2023). Komite Cipta Kerja dan Manajemen Pelaksana (Project Management Office/PMO) menjadi pengemban tugas dalam melaksanakan sekaligus implementor serta penanggung jawab dalam melaksanakan program kartu prakerja. Pembentukan terkait dengan Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja melalui Program Kartu Prakerja diputuskan bahwa program tersebut akan dilaksanakan dan dinaungi oleh kementerian bidang perekonomian. Komposisi yang terbentuk dengan adanya perpu no 36 tahun 2020 adalah sebagai berikut dimana ketua yakni terletak pada Menteri koordinator bidang perekonomian, kemudian wakil ketua yakni diambil alih oleh kepala staf kepresidenan, dan terdapat sebanyak 6 anggota yang masing-masing adalah Menteri perindustrian, Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala

BAPPENAS, mendagri, kemendikbud dan sekretaris Menteri bidang perekonomian (Nurhadi, 2020).

Pelaksanaan program bisa memenuhi efektivitas juga dikaitkan dengan adanya disposisi yang baik. Disposisi pada implementasi kebijakan mengartikan bahwa pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan (Widodo, 2021). Implementasi kebijakan kartu prakerja di Ponorogo khususnya kecamatan Sampung sendiri telah berjalan dengan baik didukung oleh sikap para tim Fasilitator Prakerja Kabupaten Ponorogo khususnya kecamatan Sampung yang memberikan kontribusi dalam mensukseskan kebijakan kartu prakerja yang dilandasi dengan komitmen dan kejujuran. Hal ini diperkuat dengan pernyataan Koordinator Tim Fasilitator Prakerja yang mengatakan dengan jujur kepada masyarakat bahwa tidak ada pungutan biaya dalam proses pendaftaran kartu prakerja yang dilakukan di Kabupaten Ponorogo khususnya kecamatan Sampung.

Strategi Program Kartu Prakerja Dalam Proses Seleksi Di Kecamatan Sampung

Pelaksanaan kartu prakerja merupakan bantuan berupa semi bansos yang dilakukan oleh pemerintah dengan anggaran yang cukup besar dan peminat yang sangat tinggi maka perlunya pemerintah dalam melakukan beberapa strategi dalam pelaksanaannya yakni menurut Direktur Eksekutif Prakerja Denni Puspa Purbasari menuturkan, selama ini ada tiga strategi dalam menjalankan program Kartu Prakerja dengan tahapan inovasi, literasi dan pengembangan bisnis (Noor, 2023). Hal tersebut selaras dengan pelaksanaan yang dilakukan oleh kecamatan Sampung dimana adanya inovasi dalam melakukan sistem komunikasi yang dilakukan yakni dengan memberikan informasi pada website dan beberapa *platform* berita, sedangkan pada literasi pemerintah kecamatan sampung mengadakan sosialisasi di balai kecamatan terhadap kepala desa terkait dengan program yang ada. Kemudian proses pengembangan bisnis dimana hal ini dimaksudkan pemerintah dalam mendukung pengembangan sumber daya manusia yang ada.

Proses pelaksanaan pemanfaatan kartu prakerja mempunyai banyak sekali peminat sehingga pemerintah menerapkan strategi ketentuan dan persyaratan sehingga penerima manfaat prakerja benar-benar mereka yang layak mendapatkannya. Penerapan ketentuan mengutip dari CNBC adalah sebagai berikut:

1. WNI berusia minimal 18 tahun
2. Tidak sedang mengikuti pendidikan formal
3. Tidak menyandang status sebagai pejabat negara, pimpinan dan anggota DPRD, Aparatur Sipil Negara (ASN), prajurit TNI, Anggota Polri, Kepala Desa dan Perangkat Desa, Direksi, Komisaris, Dewan Pengawas pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
4. Tidak terdaftar sebagai penerima bantuan dari pemerintah seperti Bansos Kemensos (DTKS), penerima BSU, BPOM atau penerima Kartu Prakerja Gelombang sebelumnya.
5. Dalam satu Kartu Keluarga (KK) hanya diperbolehkan maksimal dua orang anggota keluarga yang dapat menjadi penerima Kartu Prakerja (CNBC, 2023).

Efektivitas Program Kartu Prakerja Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Kecamatan Sampung dalam Perspektif Islam

Hasil penelitian yang dilakukan terkait ketetapan penerima manfaat kartu prakerjadi kecamatan sampung dibagi menjadi 4 indikator yakni kesesuaian dengan latar belakang pekerjaan, pendidikan, pendapatan dan kesejahteraan. Hasil penelitian menunjukkan penerima manfaat kartu prakerja di kecamatan sampung sudah sesuai dengan sasaran yang ada seperti halnya mereka yang memiliki tingkat pendapatan rendah, kemudian terkait dengan tingkat kesejahteraan yang masih kurang, dan terkait dengan pendapatan dengan kisaran 1,5 juta per bulannya dengan adanya prakerja penerima manfaat mengungkapkan bahwa mereka mengharapkan insentif yang diberikan dan pelatihan guna meningkatkan kualitas usaha yang telah dimiliki. Hasil penelitian selaras dengan yang dilakukan oleh Sinaga dimana memang ada pengaruh terkait dengan jaminan sosial prakerja dalam meningkatkan kesejahteraan Masyarakat (Sinaga, 2022). Hal ini selaras dan sesuai dengan teori pemenuhan kesejahteraan dalam pandangan Islam terkait dengan aspek pemenuhan kebutuhan dasar hidup seseorang. (Fauzia 2014) Penelitian dari Hakim mengungkapkan bahwa adanya manfaat prakerja hanya mampu membantu komunitas secara fisik-materi dan secara mental-spiritual (Hakim, 2022). Namun diperlukan pemberdayaan program secara berkelanjutan dan peran asisten tidak ada, karena insentif hanya bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan tidak mencukupi untuk modal usaha.

Hasil penelitian juga menunjukkan keterlaksanaan program yang sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh John P Campbell pada bukunya *Productivity in Organization* (1990) yakni dengan terlaksana program penerima manfaat kartu prakerja di kecamatan sampung Ponorogo, selain indikator sasaran juga telah sesuai bagi mereka yang memiliki tingkat pendidikan tergolong rendah, kemudian kesejahteraan, serta tingkat pendapatan yang masih kurang. Hal ini dibuktikan dengan paparan data dari responden yakni pada tingkat pendapat Sebagian besar penerima manfaat kartu prakerja merupakan masyarakat dengan pendapatan dibawah dua juta pada setiap bulannya yakni pada kuesioner sebesar 87,5% menyatakan tidak setuju pada pendapat mencapai dua juta, pada indikator lain adalah kepastian pendapatan, data menunjukkan bahwa sebesar 87,5% atau 7 dari 8 responden menyatakan ketidakpastian dalam pendapatannya. Selanjutnya adalah indikator pemenuhan kebutuhan dengan pendapatan yang ada yakni apakah dengan pendapatan tersebut mampu memenuhi kebutuhan, sebanyak 8 responden atau 100% menyatakan bahwa pendapatan saat ini tidak mampu mencukupi kebutuhan.

Efektivitas program pemanfaatan kartu prakerja di kecamatan sampung Ponorogo sudah memenuhi sasaran baik itu penerima dengan kesejahteraan yang kurang dan dampak dari adanya manfaat prakerja terhadap kesejahteraan penerima. Menurut pendapat dari Suardi mengungkapkan bahwa kesejahteraan dalam pandangan ekonomi Islam masih mencakup hanya dimensi materi (Suardi, 2020). Ekonomi Islam menghendaki kesejahteraan itu juga mencakup keseluruhan unsur materi dan *non* materi (*psikis*). Hal ini disebabkan kepuasan manusia itu terletak pada unsur-unsur non materi yakni adanya insentif yang

diberikan merupakan bentuk materi dan pelatihan keterampilan meningkatkan kualitas individu adalah bentuk non materi yang bisa diperoleh dalam kartu prakerja. Selain itu dengan adanya insentif yang diberikan sudah sesuai dengan kesejahteraan dalam konsep islam yakni mampu memenuhi kebutuhan dasar hidup manusia (Fauzia, 2014).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti mengenai Efektivitas Program Kartu Prakerja Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan bahwa implementasi program kartu prakerja di Kecamatan Sampung menunjukkan bahwa adanya sinergi baik antara pemerintahan pusat dengan pemerintahan kecamatan. Selain sumber daya pelaksanan kaitannya sumber daya ini adalah pada masalah anggaran dana yang diberikan. Implementasi kebijakan kartu prakerja di Ponorogo khususnya Kecamatan Sampung sendiri telah berjalan dengan baik didukung oleh sikap para tim fasilitator prakerja Kabupaten Ponorogo khususnya Kecamatan Sampung yang memberikan kontribusi dalam mensukseskan kebijakan kartu prakerja yang dilandasi dengan komitmen kejujuran. Hal ini diperkuat dengan pernyataan koordinator tim fasilitator prakerja yang mengatakan dengan jujur kepada masyarakat bahwa tidak ada pungutan biaya dalam proses pendaftaran kartu prakerja yang dilakukan di Kabupaten Ponorogo khususnya Kecamatan Sampung.

Strategi program kartu prakerja dalam proses seleksi di Kecamatan Sampung pelaksanaan yang dilakukan oleh pihak Kecamatan Sampung dengan adanya inovasi dalam melakukan sistem komunikasi yang dilakukan yakni dengan memberikan informasi pada website dan beberapa platform berita, sedangkan pada literasi pemerintah kecamatan sampung mengadakan sosialisasi di balai kecamatan terhadap kepala desa terkait dengan program yang ada. Kemudian proses pengembangan bisnis dimana hal ini dimaksudkan pemerintah dalam mendukung pengembangan sumber daya manusia yang ada. Proses pelaksanaan pemanfaatan kartu prakerja mempunyai banyak sekali peminat sehingga pemerintah menerapkan strategi ketentuan dan persyaratan sehingga penerima manfaat prakerja benar-benar mereka yang layak mendapatkannya.

Indikator efektifitas yang lain dalam program pemanfaat kartu prakerja adalah ketepatan sasaran bagi yang berhak menerima yakni data menunjukkan bahwa rata-rata atau bahkan sebagian besar penerima manfaat kartu prakerja merupakan masyarakat dengan pendapatan dibawah dua juta pada setiap bulanya yakni pada kuesioner sebesar 87,5% menyatakan tidak setuju pada pendapat mencapai dua juta, pada indikator lain adalah kepastian pendapatan, data menunjukkan bahwa sebesar 87,5% menyatakan ketidakpastian dalam pendapatannya. Selanjutnya adalah indikator pemenuhan kebutuhan dengan pendapatan yang ada yakni apakah dengan pendapatan tersebut mampu memenuhi kebutuhan akan tetapi pendapatan saat ini tidak mampu mencukupi kebutuhan.

REFERENSI

- Agustino, L. (2008). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Alfabeta.
- Badan Pusat Statistik. (2022). *Tingkat Pengangguran Terbuka (Tpt) Sebesar 5,86 Persen Dan Rata-Rata Upah Buruh Sebesar 3,07 Juta Rupiah Per Bulan*. [https://www.bps.go.id/pressrelease/2022/11/07/1916/agustus-2022--tingkat-pengangguran-terbuka--tpt--sebesar-5-86-persen-dan-rata-rata-upah-buruh-sebesar-3-07-juta-rupiah-per-bulan.html#:~:text=Tingkat Pengangguran Terbuka \(Tpt\) Agustus,Kerja Yang Terdampak](https://www.bps.go.id/pressrelease/2022/11/07/1916/agustus-2022--tingkat-pengangguran-terbuka--tpt--sebesar-5-86-persen-dan-rata-rata-upah-buruh-sebesar-3-07-juta-rupiah-per-bulan.html#:~:text=Tingkat%20Pengangguran%20Terbuka%20(Tpt)%20Agustus,Kerja%20Yang%20Terdampak).
- Budiani, N. W. (2007). Efektivitas Program Penanggulangan Pengangguran Karang Taruna 'Eka Taruna Bhakti Desa Sumerta Kelod Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar'. *Jurnal Ekonomi Dan Sosial Input*, 2(1).
- CNBC. (2023). *Segera Daftar Kartu Prakerja 2023, Ini Syarat & Caranya!* <https://www.cnbcindonesia.com/news/20230201093638-4-409964/segera-daftar-kartu-prakerja-2023-ini-syarat-caranya>
- Eko. (2023, April 4). *Wawancara* [Komunikasi pribadi].
- Faizin, Moh. (2021). *Ekonomi Makro Islam* (Moh. Nasarudin, Ed.; 1 ed.). PT Nasya Expanding Management.
- Fauzia, I. Y. (2014). *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Al-Syariah*. Kencana.
- Hadi. (2023, April 2). *Wawancara* [Komunikasi pribadi].
- Hakim, A. (2022). Pelaksanaan Program Kartu Pra Kerja Untuk Menanggulangi Pengangguran Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Di Desa Sawit Jaya, Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur). *Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa Stpmd" Apmd"*.
- Hendri. (2023, April 4). *Wawancara* [Komunikasi pribadi].
- Kades Sampung. (2023, April 2). *Wawancara* [Komunikasi pribadi].
- Leasiwal, T. C. (2022). *Teori–Teori Pertumbuhan Ekonomi Dan Hubungannya Dengan Variabel Makro Ekonomi*. Mitra Cendekia Media.
- Ningrum, H. S., Wijayanto, & A. Taufiq. (2022). Implementasi Kebijakan Kartu Prakerja dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kota Semarang. *Journal Of Politic And Government Studies*, 11(4), 160–171.
- Noor, A. F. (2023). *Ini Tiga Strategi Pemerintah Dalam Menjalankan Program Kartu Prakerja*. Republika.
- Nurhadi, W. (2020). Implementasi Kebijakan Program Kartu Prakerja Di Tengah Pandemi Covid-19. *Journal Of Political Science*, 0–10.
- Sinaga, R. (2022). Pengaruh Program Jaminan Sosial Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Pada Penerima Kartu Prakerja Di Kabupaten Banyumas Tahun 2020). *Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Uin Saizu*, 19.
- Sophia, A. (2023). *Dana Prakerja 2022 Cair Rp17,8 T, Dibagi Ke 4,9 Juta Orang!* <https://www.cnbcindonesia.com/news/20230105170445-4-403180/dana-prakerja-2022-cair-rp178-t-dibagi-ke-49-juta-orang>

- Suardi, D. (2020). Strategi Ekonomi Islam Untuk Kesejahteraan Umat. *Islamika: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 20(02), 68–80.
- Sumi. (2023, April 3). *Wawancara* [Komunikasi pribadi].
- Tim IT Kecamatan Sampung. (2023, April 2). *Wawancara* [Komunikasi pribadi].
- Umi. (2023, April 4). *Wawancara* [Komunikasi pribadi].
- Widodo, J. (2021). *Analisis Kebijakan Publik: Konsep Dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Media Nusa Creative (MNC Publishing).
- Yanuari, D. N. (2023, Januari 30). *Wawancara* [Komunikasi pribadi].